

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan dengan judul Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* (KJKS BMT) Kota Padang, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada KJKS BMT Kota Padang, dilihat dari potret manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko pembiayaan pada KJKS BMT Kota Padang diperoleh hasil penilaiannya sebesar 92,96%, yang berarti kategori sangat baik dalam meminimalisir risiko yang terjadi di dalam pembiayaan, dengan adanya fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko pembiayaan. Serta penerapan manajemen risiko pembiayaan sudah sesuai dengan konsep/teori penerapan manajemen risiko pembiayaan yang ada.
2. Variabel-variabel penerapan manajemen pembiayaan dan pengendalian pembiayaan memiliki pengaruh terhadap risiko pembiayaan bermasalah dengan nilai signifikansi alpha besar $0,000 < 0,05$. Sedangkan secara individual hanya variabel pengendalian pembiayaan dengan nilai signifikansi alpha sebesar $0,002 < 0,05$. Variabel secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat sebesar 60 persen sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal pada KJKS BMT Kota Padang yaitu pelaksanaan analisis pembiayaan yang kurang maksimal, pelayanan yang diberikan kurang baik, kurangnya pengetahuan teknis para pengelola, pengurus dan pengelola tidak tegas dalam melakukan monitoring penggunaan pembiayaan sedangkan faktor eksternal ada pada nasabah debitur yaitu terjadinya bencana alam, itikad buruk dari debitur, adanya penyalahgunaan fasilitas pembiayaan, pemalsuan usaha dan lainnya.

B. Saran

1. KJKS BMT Kota Padang perlu mengembangkan model metodologi penerapan manajemen risiko pembiayaan yang tepat dengan membuat kebijaksanaan tertulis dalam bentuk peraturan khusus (persus) mengenai identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pembiayaan. Pengawasan dari pengawas dan pengurus perlu dilakukan secara aktif, terstruktur, sistematis serta membentuk satu unit divisi internal audit.
2. KJKS BMT Kota Padang perlu peningkatan intensitas tindakan pendampingan dan pengawasan secara berkala terhadap setiap KJKS BMT Kelurahan serta adanya IT di seluruh jaringan KJKS BMT untuk mempermudah proses pengawasan penggunaan dana pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah dan dapat mengelola risiko dengan baik.

